

Pajak Sembako dan Sekolah Menyeruak, Ketua ISNU Mojokerto: Belum Tepat!

Hari Prastyo - MOJOKERTO.INDONESIASATU.CO.ID

Jun 12, 2021 - 13:53



Ketua ISNU Kab. Mojokerto

MOJOKERTO - Wacana pemerintah pusat terkait dengan rencana memungut pajak sembako dan sekolah semakin ramai diperbincangkan oleh lapisan masyarakat, mulai dari pusat sampai daerah.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan memberatkan masyarakat kelas menengah

ke bawah.

Mukti Ali, Ketua ISNU Mojokerto menjelaskan, "Kebijakan tersebut belum tepat diterapkan (saat ini), (apalagi) saat masyarakat sedang susah di masa pandemi."

Masih menurut Mukti Ali, "Jangan sampai rakyat tergiring opini bahwa pemerintah sedang dalam kepanikan."

Di tempat yang berbeda, Yustinus Prastowo (Staf Khusus Kemenkeu) menyatakan bahwa wacana tersebut tidak benar.

"Pemerintah hanya ingin mengatur harga barang (sembako), apakah akan dikenai tarif tinggi atau tarif rendah," terang Yustinus.

"Barang (Sembako, Red) yang dikonsumsi kelas atas, bisa dikenai tarif tinggi dan barang yang dikonsumsi masyarakat bawah dikenai tarif lebih rendah, bahkan bisa di bawah 10% yang saat ini berlaku," lanjutnya

Sedangkan terkait dengan dunia pendidikan, pemerintah berperan dalam mengatur lembaga yang berorientasi mencari keuntungan (Profit Oriented).

"Pelatihan profesional, Les Privat, Kursus misalnya, kan tidak bisa diakses semua lapisan masyarakat, jadi (akan dirasa) adil jika masyarakat yang mampu (mengaksesnya, diminta) bayar pajak," Yustinus menjelaskan.

Masih menurut Yustinus, "tidak semua swasta (yang dikenai pajak), namun yang memenuhi kriteria saja," ungkapnya. "(Kriterianya) akan ditentukan bersama wakil rakyat," pungkasnya. (har)